

SKRIPSI

**PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG DI KAWASAN WISATAAIR
TERJUN PROKLAMATOR NAGARI SINGGALANG KECAMATAN X
KOTO KABUPATEN TANAH DATAR DENGAN SKEMA
PERHUTANAN SOSIAL**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



Program Kekhususan: Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII)

Pembimbing :

**Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum
Dr. Anton Rosari, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2024

No.Reg : 7/PK-VIII/III/2024

ABSTRAK

Dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: SK.5973/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2022 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari Batuang Data seluas ± 756 (tujuh ratus lima puluh enam) hektare berada pada kawasan Hutan Lindung di Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 522.3/796/KPHLBB-2023 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Ekowisata Aia Tajun Proklamator pada LPHN Batuang Data Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, membantu masyarakat untuk mendapatkan hak mereka dan mengelola hutan dengan sistem pengelolaan hutan lestari, yaitu Perhutanan Sosial dalam memanfaatkan hutan untuk kesejahteraan dan pelestarian melalui prinsip keadilan, keberlanjutan, kapasitas hukum, partisipatif, dan bertanggung gugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Proses Penetapan Status Kawasan Hutan di Kawasan Wisata Air Terjun Proklamator Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sebagai Perhutanan Sosial (2) Pemanfaatan Hutan Lindung di Kawasan Wisata Air Terjun Proklamator Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dengan Skema Perhutanan Sosial (3) Peran masyarakat dalam mempertahankan fungsi hutan di Kawasan Wisata Air Terjun Proklamator Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Jenis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan status kawasan hutan di Kawasan Wisata Air Terjun Proklamator sebagai Perhutanan Sosial adalah dengan skema Hutan Desa/Hutan Nagari. Air Terjun Proklamator merupakan salah satu pemanfaatan hutan lindung yaitu pemanfaatan jasa lingkungan di bidang ekowisata. Dengan adanya program Perhutanan Sosial serta dibentuknya LPHN dan KUPS, masyarakat sekitar kawasan hutan menjadi terbantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan perekonomian serta masyarakat sudah bisa mempertahankan fungsi hutan tersebut. Namun, implementasi perhutanan sosial dalam pengelolaan Wisata Air Terjun Proklamator belum berjalan efektif dan masih menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Perhutanan Sosial, Hutan Lindung, Skema Hutan Desa/Hutan Nagari.